PM Malaysia Najib Tun Abdul Razak pun me-reshuffle kabinetnya di semester I karena ada kegagalan kinerja menteri tertentu.

Ismatillah A. Nu'ad, Peneliti

Tajuk

Kendalikan Harga

Syamsul Ashar

Pernahkah Anda menanyakan kepada ibu, isti, atau asisten rumahtangga mengenai harga kebutuhan pokok sehari-hari?

Coba tanyakan apa saja kebutuhan pokok yang biasa dibeli dengan uang Rp 50.000 atau Rp 100.000 setiap hari. Saya yakin tanpa dikonsultasi mereka serempak akan bilang: "Tidak dapat apa-apa." Mereka dengan gamblang akan menceritakan tahun lalu dengan Rp 50.000 masih bisa beli ini-itu untuk mencukupi kebutuhan dapur sehari-hari.

Ya, itulah fakta yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Nilai uang kita secara elektrisik terus melorot. Semua jenis harga sudah naik sebelum harga bahan bakar minyak (BBM) naik. Ini menjadi harga mahal yang harus ditanggung oleh rakyat akibat keraguan pemerintah menetapkan harga BBM.

Pedagang tak bisa disalahkan, karena mengantisipasi kenaikan harga BBM yang sudah didengungkan oleh pemerintah sejak tahun lalu. Kini, rencana kenaikan harga makin nyata. Tidak lama lagi harga jual bensin akan naik dari Rp 4.500 per liter, menjadi Rp 6.500 per liter. Lalu harga solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 seliter.

Tekanan pertama yang akan kita rasakan setelah harga BBM naik adalah ongkos transportasi yang naik. Pemilik angkutan umum bersiap mengerek tarif 30%-35%. Meski pemerintah cuma mengizinkan kenaikan tarif maksimal 10%.

Lonjakan ongkos transpor ini akan mengurus pengeharan masyarakat. Apalagi faktanya pada 2005 lalu lebih dari 57% angkutan umum menaikkan tarif di atas batas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perlu kita tahu, rata-rata pegawai berpenghasilan rendah, yang notabene tidak tersentuh program kompensasi, menghabiskan hampir 20% gaji untuk transportasi. Apalagi jurapan pemberi kerja enggan memikikan upah. Di sinilah negara sebarusnya hadir memastikan kenaikan ongkos transpor pada batas wajar, kalau tidak mampu menerintahkan pengusaha untuk menaikkan gaji.

Tugas lain, pemerintah harus mengendalikan harga pangan. Kini dari daftar bahan pangan yang ada, pemerintah hanya bisa mengendalikan harga beras. Sedangkan harga komoditas lainnya praktis terus liar sesuai permintaan dan penawaran.

Sayangnya pemerintah kita cuma bisa mengembap pedagang menyediakan stok cukup, atau mematikan suplai. Padahal pemerintah punya wewenang memastikan produksi pangan, memberantas pungutan liar, dan penimbunan, bahkan intervensi ke pasar menggulung permainan harga dan spekulan. ■

Opini

Bedol Desa Karyawan: Dicegah atau Dilepas

Tigor Tambunan,
Dosen Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Surabaya

Baru-baru ini, ratusan karyawan Trans Corp dikabarkan "bedol desa" menuju sebuah stasiun televisi swasta baru. Dari gambaran perusahaan asal dan perusahaan tujuan, kuat dugaan karyawan-karyawan yang berimigrasi adalah karyawan-karyawan dengan kompetensi spesifik di perusahaan asal (baca: karyawan-karyawan kunci).

Dalam industri kreatif, termasuk sektor pertelevisian, bukan hanya jajaran manajemen yang menyandang status karyawan kunci. Setiap anggota tim kreatif dan pelaksana sebuah produk televisi adalah karyawan kunci. Kehanya seorang karyawan kunci saja – perlu digarisbawahi – sebenarnya bisa menjadi penanda adanya masalah dalam sistem manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut, apalagi kalau terjadi secara massal.

Statistik dan kalkulasi kuantitatif apa pun tak akan pernah sahih untuk mengukur-wajar tidaknya angka keluar masuk karyawan dari perusahaan. Apalagi kalau yang keluar karyawan-karyawan senior. Kalau yang keluar "hanya" satu orang, masalah individual atau kebocoran pada sistem prosedur penyaringan karyawan "mungkin" masih bisa dikambinghitamkan. Tapi kalau yang terjadi bedol desa, ketidakberesan bukan terjadi di tahap awal di mana karyawan-karyawan lulus seleksi, bukan pula pada faktor individual karyawan, tapi pada faktor situasional dan kondisional organisasi yang terjadi dalam rentang waktu di mana karyawan berkarya.

Beberapa penelitian menunjukkan, tiga alasan terbesar karyawan keluar, kemudian pindah ke perusahaan lain adalah; yang *pertama* dan terbesar adalah masalah gaji. *Kedua*, masalah kinerja perusahaan yang dianggap memburuk oleh karyawan. *Ketiga*, masalah budaya perusahaan yang makin lama makin tidak sesuai dengan nilai-nilai personal seorang karyawan.

Sementara itu, menurut George F. Farris (MIT, 1969), rencana keluarnya karyawan dari sebuah perusahaan sebenarnya dapat diprediksi. Orientasi dan karakteristik individual, keterlibatan dalam perusahaan, faktor-faktor pekerjaan, kedekatan dengan karyawan lainnya, penghargaan, kinerja, dan beberapa faktor persepsual adalah hal-hal yang dapat digunakan untuk meramal akankah seorang karyawan bertahan lama atau tidak dalam perusahaan. Sebenarnya, tidak mungkin sebuah perusahaan tidak mengetahui ada masalah pada faktor-faktor tersebut jika gejalanya bersifat massal. Kecuali memang tidak mau tahu!

Kalau bedol desa tak terelakkan, kemungkinannya dua. Perusahaan tetap bersikeras dengan efektivitas kondisi kerja yang ada saat ini. Atau, perusahaan tidak mampu menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif bagi karyawan-karyawannya.

Banyak jajaran manajerial perusahaan merasa terlalu gengsi untuk meminta karyawan yang "ngambek" atau "sakit hati" tetap tinggal dalam perusahaan asal. Kerendahan hati semacam ini dianggap merendahkan diri sendiri. Seperti mengibarkan bendera putih tanda kekalahan perusahaan dari karyawan. Padahal bedol desa karyawan bukan – dan tidak akan pernah menjadi – peristiwa organisasi biasa. Pasti akan mengganggu kinerja perusahaan. Bedol desa menjadi pertanda perusahaan yang ditinggal sedang sakit karena ulah sendiri, atau bakal sakit karena tingkah perusahaan lain.

Masalah internal akibat bedol desa karyawan bukan hanya masalah cari karyawan pengganti dan besarnya biaya manajemen sumber daya manusia yang muncul sebagai konsekuensinya. Ada masalah yang jauh lebih besar dan mahal. Yaitu, bagaimana menyehatkan kembali iklim organisasi yang sakit. Mencegah karyawan berkinerja baik keluar sedini mungkin jauh lebih efektif daripada mencari karyawan baru.

Cegah bedol desa

Makin besar pertumbuhan sebuah industri, makin rentan sebuah perusahaan dalam industri tersebut dari serangan penyakit-penyakit organisasional. Makin besar pula kemungkinan terjadinya "bedol desa". Loyalitas karyawan mendadak barang yang semakin tidak jelas juntrunganya karena nilai-nilai transaksional ekonomi profesi dalam hubungan industrial makin transparan. Hitung-hitungan di atas kertas, menyediakan gaji tinggi bagi puluhan sampai ratusan karyawan dari satu "desa yang baru dibedol" lebih murah daripada mencari karyawan baru. Biaya pembangunan budaya organisasi juga bisa dihemat secara luar biasa lewat membajak karyawan perusahaan lain meski efektivitasnya masih dipertanyakan.

Setiap perusahaan – tidak terbatas pada industri kreatif – mesti bersiap diri menghadapi bencana organisasional yang sangat mahal ini. Kalau tidak ingin mengalami pembajakan atau bedol desa karyawan, setiap perusahaan perlu merancang ulang dan mengimplementasikan sebuah sistem nilai transaksional profesi yang efektif dan relevan bagi karakteristik dan kebutuhan karyawan. ■

SMS

Gubernur BI harus evaluasi tabungan di bank yang hampir tidak ada bunganya, sementara bunga kredit tinggi. Kasihan pada penabung. Bank mau enak sendiri?

Hp 8161665xxx

Aneh, kalau presiden menaikkan harga BBM, PKS tidak setuju. Nah, bagaimanakah sebenarnya PKS ada di tangan Presiden SBY tentunya.

Hp 0811140xxx

Harga BBM di Indonesia lebih murah, harga di pasar internasional bergerak naik lagi. Sebaiknya jangan mematok harga BBM Rp 6.000–Rp 6.500, tetapi besaran subsidinya yang dipatok dan harga BBM lokal fluktuatif.

Hp 02168826xxx

Intoleransi akan menjadi peninggalan Presiden SBY jika jemaah Muslim Syiah di Sampang, Madura, tak bisa kembali ke tanah kelahirannya dan jemaah Ahmadiyah di berbagai daerah tidak bisa beribadah dengan nyaman.

Hp 0815984xxx

Kirim SMS Anda
081808 566826

Surat dan Pendapat
Gedung KONTAN
Jl. Kebayoran Lama No.1119, Jakarta 12210
021 -535 7636
021 - 532 8134
021 - 535 7633
0818 08 566826 KONTAN
red@kontan.co.id

Surat

Pentingnya Ketahanan Energi

Tahun 2013 ini pemerintah kembali dipusingkan dengan masalah subsidi BBM yang terus membesar.

Namun, tujuan menaikkan harga BBM bukan hanya soal ketahanan fiskal, tapi tidak lain untuk mengu ketahanan energi nasional. Cadangan energi dalam negeri saat ini sudah semakin berkurang. Dengan demikian ketahanan energi cenderung akan semakin lemah. Apalagi 85% energi di Indonesia dikelola oleh pihak asing, selebihnya 25% dikelola oleh Pertamina.

Ketahanan energi, khususnya BBM, merupakan salah satu faktor krusial dalam ketahanan nasional. Ini juga terbukti dengan data-data yang menunjukkan stok BBM kita lebih rendah dari beberapa negara lain. Wajar, kalau kita bersaha membiasakan diri dengan harga pasar untuk BBM ini, sehingga masyarakat juga terdorong untuk lebih hemat karena mahal.

Yanto Wandi,
Jl. Persahabatan Timur No. 5, Rawamangun, Jakarta Timur

Perilaku Debt Collector Menyebalkan!

Perilaku *debt collector* yang saya perkirakan bekerja untuk Bank Danamon benar-benar menyebalkan: membentak-bentak dengan kasar, bahkan juga mengancam-ancam segala.

Ceriteranya, seseorang dengan inisial Ds telah menguna-nakan nomor telepon rumah kami 021875xxx, tanpa izin sebagai referensi untuk aplikasi kartu kredit Bank Danamon. Singkat ceritera, orang tersebut tidak membayar tagihan alias ngemplang kartu kredit sebesar sebesar Rp 1,2 juta. Jumlah yang tidak banyak sebetulnya.

Namun, jelas saya juga tidak mau membayar utang kartu kredit yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan saya.

Namun, seseorang yang mengaku sebagai orang Danamon terus menteror lewat telpon ke rumah kami. Jelas ini bisa membuat istri dan anak-anak kami ketakutan.

Untuk itu, bila *debt collector* itu diseiwa Bank Danamon, saya yang juga seorang nasabah bank yang sama minta Bank Danamon menghentikan teror tersebut. Apa wajar, hanya karena nomor telpon rumah saya dipakai orang yang minta kartu kredit, kamudian anak-anak kami harus bertanggungjawab pada utangnya.

Susanto,
Cibinong, Bogor

Jangan Bermental Miskin

Salah satu masalah yang akan dipecahkan lewat kenaikan harga BBM bersubsidi adalah mengurangi subsidi di APBN.

Idealnya, subsidi adalah pemberian pemerintah kepada rakyatnya yang masuk dalam kategori tidak mampu, agar dapat membantu kehidupanya.

Namun, pemerintah menemukan pengguna BBM bersubsidi lebih dari 70 persen adalah dari kalangan mampu. Maka, subsidi tidak tepat sasaran.

Saya ingin mengajak agar orang kaya atau berduit jangan bermental miskin. Mental miskin adalah mental orang yang maunya disuapi terus. Tentu mengjadi tidak masuk akal kalau orang kaya tetapi maunya disuapi terus oleh pemerintah. Budaya malu memang telah hilang di negara kita.

Sebuseuya kita bisa berkaca kepada Jepang dan Korea Selatan, negara yang luasnya masih kalah dari negara kita, tetapi punya mental yang baik untuk menjadi negara maju. Seperti Jepang, hancur oleh perang, namun kini telah menjadi negara super maju.

Agustianto,
Perumahan Citra Indah, Blok D4 no. 37, Cileungsi-Bogor

Pecah Setgab dan Reshuffle Kabinet

Ismatillah A. Nu'ad,
Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, Universitas Paramadina

Menjelang kenaikan harga BBM, Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dikomandoi Partai Demokrat untuk menyokong 'jalan mulus' kebijakan kebijakan pemerintah mengalami limbik limbik perpecahan. Misalnya saja, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggelar sidang Majelis Syuro untuk menentukan sikap atas kebijakan kenaikan harga BBM. Sidang ini juga menentukan nasib PKS di Setgab koalisi.

Dalam kasus PKS, jika partai ini keluar dari Setgab, maka Pemerintahan SBY kemungkinan besar akan melakukan *reshuffle* kabinet. Sebagai jalan untuk membenahi Setgab, barangsiapa partai yang sudah tidak selaras dengan alur pemerintah, maka dipastikan perwakilan menteriny akan dikeluarkan. Dari titik itulah, secara jelas terlihat bahwa jalanya roda pemerintahan selama ini tergiyata bergejalan sangat rapuh, seringkali kepentingan publik terabaikan oleh kepentingan senpuh golongan.

Semula, Setgab memang dipraksarsai untuk meneyelaraskan kinerja eksekutif vis-a-vis legislatif. Namun akibat tarik ulur kepentingan, misalnya, dalam soal rencana kenaikan harga BBM itu, nampaknya Setgab sangat sulit bejalan selaras; selain juga ada banyak persoalan internal yang tidak kompak, seperti tebongkarnya kasus impor daging yang melibatkan elite-elite PKS.

Sebenarnya, lepas dari persoalan *reshuffle* yang dikaitkan dengan pecahnya Setgab, *reshuffle* oleh sejumlah analisis sangat diperlukan. Dalam rangka itu, Presiden me-*reshuffle* kabinet dengan cara menilai secara objektif siapa sajakah dari sekian menteri yang dianggap kurang bekerja secara optimum, apalagi jika ada di antara para menteri yang mendapat rapor merah atau merika yang berjalan ditempat. Alih-alih hanya berjalan di tempat, bahkan ada sejumlah menteri yang justru membawa "petaka" bagi bagi masyarakat akibat terlibat skandal.

Publik pun sebenarnya mengetahui, bahwa terbentuknya KIB II tak lepas dari "kontrak politik" SBY dengan partai-partai besar tertentu, namun sekiranya Presiden harus memiliki keberanian untuk melepaskan "kontrak politik" itu jika sekiranya tak menguntungkan dan tak menidanjawab masalah bagi orang banyak. Sebenarnya kemungkinan *reshuffle* kabinet sangat dipertegas akibat terlahirnya Presiden dengan koalisi Partai Demokrat vis-a-vis partai-partai besar.

oldman.p

Namun jika mau ambil contoh, PM Malaysia Najib Tun Abdul Razak pun mengambil langkah politik me-*reshuffle* kabinetnya dalam semester pertama. Itu dilakukannya karena ada kegagalan dalam kinerja menteri tertentu, misalnya, Menteri Transportasi Ong Tee Keat yang diganti Kong Cho Ha sebagai menteri yang baru. Tak hanya di Malaysia, PM Thailand Abhisit Vejajiva pun mengambil langkah *reshuffle* saat di negerinya tetjadi kekacauan, dia melihat ada menteriny yang tak bocus mengurus kemanaan dalam negeri negaranya, sehingga menteri tersebut harus diganti dengan yang baru yang lebih memiliki tanggung jawab.

Sesudah amendemen UUD 1945, Presiden SBY sebenarnya memiliki wewenang penuh atau hak prerogatif untuk mengganti atau tidak para pembantunya. Pada Pasal 17 ayat 2 menyebutkan soal bahwa Presiden bisa mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Lagi pula semenjak awal pembentukan KIB II, secara riil aroma politik kepentingan dari partai-partai politik tertentu tidak dapat diabaikan. Nampaknya hal itu terbukti dengan kinerja para menteri yang kurang profesional. Kurangnya profesionalitas itu, misalnya, tecermin dalam pembenahan ekonomi yang bukanmya bertambah konduisif, tetapi semakin kurang menentu.

Dengan *reshuffle* kabinet saat ini dulu, lagi sangat perlu, salah satu alasannya adalah mandeknya ekonomi sektor riil yang harus ditangani secara serius, yaitu menyangkut itu tenaga kerja, pengangguran, dan soal kemiskinan. Karena itu, lalh Menko Perekonomian mendapat rapor merah dan sepertinya Presiden SBY harus memikirkan secara serius supaya menggantinya dengan menteri baru yang lebih profesional dan tahu persoalan.

Presiden SBY yang memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan harus tangap terhadap isu-isu yang berkembang dan muncul saat ini. Soal perlu tidaknya dilakukan *reshuffle* tentunya Presiden yang paling dapat merasakan dan menilainya. Namun tentunya, dengan adanya tuntutan dari berbagai pihak juga patut dipertimbangkan. Apalagi saat Presiden melantik para menteri yang terpilih dalam KIB II disertai adanya "kontrak politik" di mana para menteri tersebut tentuya mendapat *assessment* jika dia tak bisa memenuhi perubahan dalam waktu tertentu maka sudah sepantasnya di-*reshuffle*.

Di masa datang, Presiden SBY selaku pembentuk kabinet harus dapat membentuk format yang tepat dalam penentuan person-person yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagaimana yang dikatakan dalam ungkapan *the right man at the right places*. Dengan demikian SBY dalam sisa kurun waktu pemerintahannya akan tetap memperoleh keperayaan dari konstituennya dalam menghadapi periode berikutnya. Dengan format baru setelah adanya *reshuffle* kabinet, SBY harus dapat memberikan pencitraan politik yang positif kepada publik bahwa pemerintahannya masih solid dan masih mampu mewujudkan harapan dari banyak pihak yang berkalan dengan kesejahteraan umum sebagaimana dimanatkan dalam Pembukuan UUD 1945.

Sekiranya isu *reshuffle* tak usah dibawa-bawa ke ranah politik yang terlalu jauh oleh para politisi partai yang menteriny akan di-*reshuffle*, melainkan semestinya mereka lebih mementingkan kepentingan rakyat. Jika seorang menteri harus diganti karena kurang profesional dan telah gagal, maka sudah sepantasnya harus diganti, bukan mempertahankan diri atas alasan politik yang kurang bisa dipertanggungjawabkan itu. ■

Penerbit PT Grahanusa Mediatama Surat Izin: Surat Keputusan Menpen Nomor 307 / SK/PP/B.1/1996, tanggal 19 Maret 1996. **Direktur** Lukas Widjaja, Ardian Taufik Gesuri **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Ardian Taufik Gesuri **Dewan Redaksi:** Ikrar Nusa Bhakti, Hamid Basyaib, Hendrik Yunaprito, Dhimyati Partowidjojo, Tito Sianipar, Bagus Manuab, Ahmad Fahrizal, Markus Sumartomdjojo, R. Cipto Wahyono, Barly Haliem Noe, Ash Kirana Wardani, Johana Ani Kristanti, Umar Bakhtiar, Taufiqurrohman, Sandy Baskara, Rusip Mahfudh, Avanty Nurdiana, Adi Wikanto, Dyah Megasari, Duplo Karisa, Ignatius Andri Indradie, Riski Caterina, Fransiska Firlana S., Andriyani Ika Pertiwi, Eki Nur Arifiana, Yudho Winarto, Dikky Setiawan, Hendra Gunawan, A. Henry Prasetya, Ansellia Putri Hasniziwati, Tedy Gumilar, Sofyan Nur Hidayat, Christina Novita, Fahriyadi, Ragil Nugroho, Mona Debora Tobing, Yeni Nurhanisyah, Aryadi, Maradina Nagita, Marlinda Raka, Maliati Atinya Dari, Dina Farizah, Agus Triyono, Ignatio M. Sri Sayekti **Manager Produksi & Pengarah Rancang Grafis:** Indra Surya **Rancang Grafis:** Candra Kusmana, Hendrik ST Oloan Tambunan, Steve G.A., Pj. Prakasa Suhana, Nasrullah **Redaksi Bahasa:** Hj. Ayu Sutarto, Gatot Ari Widiyono **Perpustakaan dan Pemelihara Data:** Dani Kiddity, Dedi Suksmana, Dedi Riswiani, Priyanto, Nugroho **Ikloni:** B. Erina Haryati, Saulina Artanto, Aris Akhmadi, M. Iqbal, Kahgomou Unggul Etnagara **By Product:** Guido S. Radityo, Gusmawan Tabu, Ngadiran, Lecky Alan **Alamat Redaksi:** Gedung KONTAN, Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210 **Ikloni:** Gedung KOMPAS GRAMEDIA, Jalan Palmerah Selatan No. 22-28 Unit II Lt. 2, Jakarta Selatan 10270 **Sirkulasi:** Gedung KOMPAS, Jalan Gajah mada No. 106-110A Jakarta 11140 **Telepon:** Redaksi (021) 535 7636, 532 8134, Iklan (021) 536 19909, 548 3008 **Faksimile:** Redaksi (021) 535 7633, Iklan (021) 5369 9080, Sirkulasi (021) 260 0972 **E-mail:** red@kontan.co.id. **Web site:** www.kontan.co.id Dicetak oleh: Percetakan **PT Gramedia** Ini di luar tanggung jawab percetakan. **Tarif Iklan Harian Kontan 2013:** Regular, BW (minimum 40 mm): 35.000 /mm, FC (minimum 600 mm): 55.500 /mm. Advertorial Kali terbit: Kursi/Seminar/Workshop/Diklatsip, BW (minimum 200 mm): 18.500 /mm, FC (minimum 600 mm): 21.000 /mm. Sponsor halaman 1: FC 111.000 /mm, posisi diluar halaman 1: FC 83.250 /mm. Sponsor diluar halaman 1 BW 52.500 /mm. Sponsor Nasional halaman 1: FC 80 mm x 20 mm (20x tertib) 66.500.000 /paket. Bagian halaman 1: 7 x 30 mm FC 38.850.000 /1 kali tertib. 7 x 70 mm FC 54.390.000 /1 kali tertib. Klasifiad, Island Ad BW (min. 450 mm/maks. 1.890 mm): 56.000 /mm, Island Ad FC (min. 810 mm/maks 1.890 mm): 38.000 /mm. Alias Kolom, 1 Kolom BW (min. 20mm/maks. 150mm) 24.000 /mm. Alias Baris, (min. 98 karakter) 400 /karakter. PAKET A: 26 x tertib: 1 x 50 mm BW 6.600.000, - 1 x 100 mm BW 4.100.000, - 1 x 100 mm BW 5.800.000, - 2 x 50 mm BW 6.800.000, - 2 x 100 mm BW: 14.000.000, - Contoh: *Minimum ukuran iklan regular FC 600/mm, *Tarif iklan regular belum termasuk diskon Agensi dan PPN 10%, berlaku mulai 1 Januari 2013. *Tarif iklan layanan kesongan belum termasuk diskon Agensi dan PPN 10%, berlaku mulai 1 April 2013, harga dalam IDR.

Kontan
Isi iklan menjadi tanggung jawab pemasang iklan, KONTAN tidak bertanggung jawab atas materi iklan.
WARTAWAN "KONTAN" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER